

Bab I

Pendidikan Jarak Jauh Dalam Konteks Pendidikan Nasional

Setijadi

A. Definisi Pendidikan Jarak Jauh

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), adalah belajar yang direncanakan, yang biasanya terjadi di tempat lain di luar tempat mengajar. Oleh karena itu, diperlukan teknik-teknik khusus desain mata pelajaran, teknik-teknik khusus pembelajaran, metodologi khusus komunikasi melalui berbagai media, dan penataan organisasi serta administrasi yang khusus pula (Moore dan Kearsly, 1996)

Dengan demikian, pada dasarnya pendidikan jarak jauh, adalah jenis pendidikan di mana peserta didik berjarak jauh dari pendidik, sehingga pendidikan tidak dapat dilakukan dengan cara tatap muka. Karena itu penyampaian pesan pendidik kepada peserta didik harus dilakukan melalui media. Media tersebut dapat berupa media cetak, radio, televisi, telepon, orang tua, masyarakat awam, komputer atau media lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan. Karena pesan diberikan melalui media, maka peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Belajar mandiri tidak perlu berarti belajar sendiri, akan tetapi yang penting adalah belajar dengan tanggung jawab sendiri. Bertanya kepada teman peserta didik, kepada orang lain yang lebih tahu, atau mencari sumber lain, di perpustakaan misalnya, untuk menjawab pertanyaan, sering

diperlukan peserta didik, bilamana ia kurang mengerti bahan ajarnya.

Kemandirian memang tidak dapat dituntut dari peserta didik yang belum dapat membaca dan menulis, karena itu, bagi anak-anak maupun orang dewasa yang belum dapat membaca dan menulis, media PJJ yang digunakan adalah orang, biasanya orang tua untuk anak-anak; dan anggota masyarakat lain yang sudah menguasainya bagi orang dewasa. Orang yang ditunjuk menjadi media tersebut mendapatkan tugas untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan atau diketahui peserta didik yang belum dapat membaca dan menulis. Misalnya, yang dilakukan ibu-ibu di Australia untuk mendidik anak kecilnya, atau ibu-ibu di Indonesia dalam mendidik anaknya pada usia dini.

Lembaga PJJ sendiri menyediakan interaksi antara peserta didik dan pendidik atau tutor untuk mengadakan interaksi (diskusi, tanya-jawab) secara tatap muka atau jarak jauh (melalui surat, telepon atau komputer). Akan tetapi tutorial ini jarang dilakukan sehingga peserta didik memang harus banyak belajar secara mandiri. Bila peserta didik tidak ingin belajar mandiri, PJJ bukan cara yang baik untuk menambah pengetahuan dan keterampilan (kecuali bagi mereka yang masih sangat kecil dan yang masih buta huruf, PJJ dapat dilaksanakan dengan media orang tua atau anggota masyarakat lain).

Kecuali (1) adanya jarak yang jauh antara peserta didik dan pendidik, dan (2) individualisasi dan kemandirian dalam belajar. Ada beberapa karakteristik lain yang menjadi ciri PJJ, yaitu (3) adanya bahan ajar yang biasanya dikembangkan sendiri oleh lembaga PJJ, (4) penggunaan berbagai media pembelajaran, (5) adanya bantuan belajar yang berupa tutorial dan bantuan belajar lainnya yang terbatas, (6) adanya proses industrialisasi dalam pengembangan, pengadaan dan distribusi bahan belajar.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

B. Permasalahan Pendidikan Nasional

Permasalahan pendidikan biasanya dibagi menjadi empat bagian: pemerataan, kualitas, relevansi dan efisiensi.

1. Masalah Pemerataan Pendidikan

Pemerataan pendidikan bukan sekedar membangun sekolah di mana-mana, akan tetapi juga membuat sekolah yang dapat terjangkau oleh semua anak, terutama pendidikan yang sudah masuk dalam kategori kewajiban belajar. Di Indonesia hal itu berarti bahwa semua anak Indonesia tanpa kesulitan harus dapat masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Mulai tahun 1974 Indonesia secara besar-besaran membangun gedung sekolah dasar di mana-mana, tanpa perencanaan dan persiapan yang matang. Akibatnya, gedung-gedung terbangun dengan cepat, karena uang untuk itu disediakan Pemerintah. Buku-buku juga disediakan cukup cepat, akan tetapi tanpa kualitas yang cukup memadai.

Masalah yang sangat sulit diatasi adalah penyediaan guru yang dapat mencukupi jumlah sekolah yang didirikan. Meskipun pada waktu itu yang dibutuhkan sekolah dasar hanya guru-guru yang lulus sekolah pendidikan guru, akan tetapi untuk mendidik guru baru setidaknya-tidaknya diperlukan waktu 4 tahun. Untungnya pada waktu itu persediaan guru yang belum terangkat masih cukup banyak, sehingga guru-guru tersebut dapat diangkat dari status honorer menjadi guru tetap. Guru-guru yang belum mengajar ditempatkan di sekolah-sekolah dasar yang baru.

Pada waktu yang bersamaan pemerintah juga mendirikan SPG-SPG baru untuk menambah guru-guru di sekolah-sekolah yang masih banyak sekali direncanakan. Pada tahun 1974 baru 40% anak usia sekolah dasar yang masuk sekolah, sehingga masih diperlukan berpuluh-puluh ribu sekolah dasar baru (standar enam kelas) untuk

dapat menampung 60% anak yang belum tertampung. Pada tahun 1985 hampir semua anak usia sekolah dasar sudah masuk SD. Masih sekitar 15% yang belum dapat dijangkau sekolah karena tempat tinggal yang terpencil atau karena cacat mental atau fisik.

Meningkatkan angka partisipasi dari 85% menjadi 100% memerlukan usaha-usaha khusus. Pemerintah mulai mendirikan sekolah-sekolah kecil di daerah-daerah terpencil dengan beberapa guru mengajar kelas ganda. Percobaan-percobaan untuk mengintegrasikan anak-anak tuna daksa dan tuna rungu di dalam sekolah-sekolah biasa juga dilaksanakan. Tetapi usaha untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh di SD dengan Proyek Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang tua dan Guru), yang dimulai pada tahun 1973, tidak dapat berkembang karena terkalahkan oleh perkembangan SD konvensional yang menjadi proyek utama Pemerintah. Baru sekitar permulaan 1980-an dimulailah pendidikan jarak jauh di tingkat SMP (SMP Terbuka). SMP Terbuka juga hampir lenyap karena dilanda SMP konvensional yang didirikan di mana-mana. Baru setelah keuangan pemerintah menurun dan wajib belajar dicanangkan untuk sembilan tahun maka pemerintah kembali memperhatikan SMP Terbuka sebagai salah satu alternatif yang realistis .

Pada tingkat pendidikan tinggi masalah pemerataan juga baru ditangani melalui pendidikan jarak jauh setelah pemerintah dan swasta tidak lagi sanggup melakukan pemekaran melalui pendidikan konvensional. Pada waktu yang hampir bersamaan, ada usaha untuk meningkatkan guru sekolah dasar setingkat dengan Diploma II (D-II), sehingga mereka perlu pula dididik melalui perguruan tinggi. Pada tahun 1984 sebuah perguruan tinggi jarak jauh dibuka oleh pemerintah untuk menampung lulusan SMA yang hendak meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi, baik bagi mereka yang baru lulus maupun mereka yang sudah bekerja. Selain itu,

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

perguruan tinggi jarak jauh tersebut, yang dinamakan Universitas Terbuka (UT), ikut serta meningkatkan kemampuan guru sekolah dasar setara dengan tingkat D-II. Pendidikan jarak jauh dapat melakukan peningkatan tersebut tanpa banyak mengganggu kelancaran pelajaran di sekolah dasar yang bersangkutan karena guru-gurunya tetap dapat mengajar, di samping meneruskan pendidikannya.

2. Masalah Kualitas Pendidikan

Memperbanyak sekolah secara besar-besaran seperti di Indonesia dengan INPRES SD, barangkali belum pernah dikerjakan di mana pun di dunia ini. Meskipun demikian, pengembangan sekolah secara cepat, selalu menimbulkan masalah kualitas. Artinya, sekolah-sekolah yang baru biasanya tidak dipersiapkan dengan baik sehingga terjadi kemerosotan kualitas, apakah itu kualitas kurikulumnya, gurunya, gedungnya, peralatan pelajarannya, atau yang lain lagi, yang kemudian menghasilkan kemerosotan hasil belajar. Karena memang tidak mungkin menyiapkan pemekaran sekolah sedemikian banyaknya (sampai lebih dari 10.000 SD tiga kelas per tahun pada waktu jaya-jayanya SD INPRES) dengan cermat. Karena itu, tidak seyogyanya kita membandingkan kualitas pendidikan sekolah pada waktu pemekaran dengan kualitas pendidikan sekolah sebelumnya. Belum lagi bila yang menjadi bahan pembandingan adalah sekolah-sekolah di zaman 'normal', di mana gaji guru dan keperluan sekolah tersedia dengan cukup. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa kualitas tidak dapat dinaikkan setelah sekolah-sekolah tersebut berdiri. Dalam hal ini pendidikan jarak jauh juga dapat dipertimbangkan, meskipun pendapat umum mengatakan bahwa tidak mungkin pendidikan jarak jauh dapat lebih tinggi mutunya daripada pendidikan konvensional. Pemekaran yang cepat dari SD ini kemudian mengakibatkan pemekaran cepat dari SMP

dan disusul dengan pemekaran SMA dan perguruan tinggi secara cepat pula.

Ada beberapa unsur pendidikan jarak jauh yang dapat dipergunakan untuk ikut meningkatkan kualitas pendidikan sekolah konvensional, sehingga bilamana unsur-unsur tadi dipergunakan secara meluas di sekolah-sekolah konvensional maka unsur-unsur itu dapat membantu meningkatkan pendidikan di sekolah-sekolah konvensional tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah (1) bahan ajar yang lebih mudah dimengerti oleh siswa, dan biasanya lebih bermutu daripada bahan belajar "diktat" yang digunakan di perguruan tinggi konvensional, karena khusus dirancang untuk belajar mandiri dan dikembangkan oleh pengajar-pengajar yang terpilih; (2) ujian yang terkalibrasi; (3) tugas mandiri yang dirancang khusus supaya siswa dapat bekerja mandiri; (4) pengajaran berbantuan media noncetak, terutama yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Masalah Relevansi Pendidikan

Masalah ini berkaitan dengan kualitas pendidikan, namun dapat dibicarakan tersendiri karena banyak lembaga pendidikan yang berusaha memberikan pendidikan yang berkualitas dengan kriteria yang kurang relevan dengan kebutuhan hidup peserta didik. Bila yang diusahakan oleh lembaga pendidikan adalah kecakapan ilmu pengetahuan yang formal, maka paling tidak ada dua hal yang tidak diperhatikan. *Pertama*, pengembangan anak sebagai manusia yang berkembang secara baik, yang dapat mengarungi kehidupannya dengan jelas tanpa terlalu banyak konflik batin, dan yang juga peduli terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya. *Kedua*, ketrampilan yang diperlukan untuk mencari kerja maupun untuk menghadapi masalah-masalah teknis dalam kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Tanpa kedua hal itu maka pendidikan

menjadi kurang relevan. Pendidikan formal juga relevan bagi kehidupan peserta didik, akan tetapi penekanan kepada pelajaran formal, mengejar angka, seperti yang dilakukan kebanyakan lembaga pendidikan kini, melupakan sesuatu yang lebih relevan bagi kehidupan peserta didik. Pendidikan jarak jauh maupun pendidikan konvensional keduanya dapat meningkatkan relevansi pendidikan di semua tingkat.

4. Masalah Efisiensi Pendidikan

Masalah ini hubungannya dengan proses pendidikan, yang oleh banyak pengamat dan peneliti pendidikan disebut sebagai kotak hitam, karena dalam prakteknya sukar untuk diketahui proses pendidikan yang terjadi di dalam maupun di luar kelas: bagaimana semangat dan cara anak belajar, bagaimana guru mengajar di kelas, dan proses pendidikan lainnya yang terjadi di kelas maupun di rumah atau tempat lain. Yang kita ketahui adalah hasil akhir proses belajar yang berupa nilai tes dan ujian. Efisiensi pendidikan juga dapat kita ukur dari segi ekonomi: berapa biaya yang kita keluarkan untuk mendidik lulusan dengan kualitas seperti ini? Ditinjau dari segi ini barangkali sekolah-sekolah Indonesia cukup efisien karena biaya keseluruhan (jumlah dari biaya yang dikeluarkan orangtua, masyarakat dan pemerintah) yang dikeluarkan untuk menghasilkan lulusan relatif kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan banyak negara lain dengan kualitas yang sama. Ditinjau dari segi ini pendidikan jarak jauh biasanya juga dianggap lebih efisien daripada pendidikan konvensional karena biaya sarana dan prasarana serta biaya untuk guru, bagi PJJ jauh lebih sedikit daripada pendidikan konvensional, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan orang tua bilamana anak harus hidup di kota lain karena di kota tempat tinggal orang tua tidak ada lembaga pendidikan konvensional yang diinginkan.

Yang menjadi masalah adalah, apakah yang terjadi di lembaga pendidikan? Ada lembaga pendidikan yang seakan-akan tidak memberi pelajaran yang baik, terlihat dari banyaknya orang tua yang mengeluh karena mereka harus ikut mengajar anak untuk dapat menyelesaikan pekerjaan rumah. Lagipula pekerjaan rumah yang diberikan setiap hari sangat banyak. Lembaga pendidikan jarak jauh memang ada yang mengandalkan bantuan orang tua untuk mengajar. Misalnya, yang dilakukan di Australia dan Selandia baru melalui radio atau media lain. Orang tua di daerah terpencil dibekali untuk dapat mengajar anaknya yang belum mampu belajar mandiri atau menjadi tutor bagi anak yang sudah dapat mandiri. Cara ini memang tidak dapat dihindari karena tempat tinggal mereka jauh dari sekolah yang terdekat. Bagi semua pihak yang tersangkut, baik pemerintah, orang tua maupun lembaga pendidikan, cara tersebut dapat dibenarkan dan untuk lingkungan tertentu sangat efisien.

C. Peranan Pendidikan Jarak Jauh dalam Pemerataan Pendidikan yang Bermutu

1. Peranan Pendidikan Jarak Jauh pada Akses Pendidikan

Pendidikan jarak jauh dengan berbagai nama, mulai tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi sudah pernah dilaksanakan di Indonesia dengan hasil yang bervariasi. Ada yang berhasil baik dan dilaksanakan sampai sekarang, ada yang dihentikan karena hasilnya kurang memuaskan, dan ada yang dihentikan karena kalah bersaing dengan sekolah yang sudah lebih dikenal. Namun, semua pendidikan jarak jauh pada semua tingkat dilaksanakan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan untuk mereduksi biaya. Jadi, desain pendidikan jarak jauh adalah untuk meningkatkan akses pendidikan di semua tingkat.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

Pendidikan jarak jauh pada tingkat sekolah dasar dimulai dengan Paket A setara SD. Paket A digagas dan dilaksanakan oleh pendidikan luar sekolah. Semula Paket A setara SD tidak dilihat sebagai sungguh-sungguh setara karena kurikulumnya cukup berlainan, akan tetapi setelah pemerintah mencanangkan wajib belajar enam tahun dan ternyata Paket A memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada partisipasi anak umur 6 sampai 12 tahun pada tingkat SD, maka Paket A dalam statistik resmi dimasukkan sebagai ekuivalen dengan SD. Paket A sebetulnya tidak pernah dinamakan pendidikan jarak jauh, akan tetapi ia menggunakan unsur-unsur pendidikan jarak jauh: modul belajar, partisipasi masyarakat dan orang tua untuk ikut membina Paket A, dan pembinaan dilakukan secara terpusat. Yang lebih tepat disebut belajar jarak jauh di tingkat SD adalah SD Pamong SD ini mengikuti kurikulum SD secara lengkap dan dibina oleh guru-guru SD setempat. Modul belajar dan ujian dibuat terpusat. Anak dibiasakan untuk belajar mandiri sejak ia dapat membaca dan menulis. Belajar dalam kelas dibatasi seminimum mungkin, sehingga anak dapat membantu orang tuanya untuk bertani sambil belajar. Sayangnya SD Pamong tidak dilaksanakan secara meluas di luar daerah percobaan, karena pada saat itu SD Inpres sudah sangat meluas sehingga pemerintah tidak merasa perlu untuk melanjutkan SD Pamong. Pada saat ini mungkin sistem Pamong dapat sangat membantu dalam meningkatkan angka partisipasi anak umur 6 sampai 12, tanpa membuat gedung baru dan mengangkat guru-guru baru.

Pendidikan jarak jauh pada tingkat SLTP dimulai dengan SMP terbuka yang didesain sebagai pendidikan jarak jauh. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan akses kepada anak umur 12 sampai 15 tahun karena tidak dapat tertampung di SMP konvensional. SMP terbuka juga lama sekali mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai alternatif pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan pada tingkat itu. Baru setelah pencanangan wajib belajar 9 tahun,

SMP terbuka menjadi alternatif pendidikan yang diselenggarakan secara meluas. Sekarang SMP terbuka sudah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia.

2. Membuat Pendidikan Jarak Jauh yang Bermutu

Mutu pendidikan pertama-tama tergantung dari mutu masukannya, yaitu mutu peserta didiknya. Akan tetapi perguruan tinggi jarak jauh biasanya juga pendidikan terbuka, yang berarti lembaga PTJJ tidak menyeleksi masukannya. Dengan demikian, siapapun yang ingin masuk PTJJ akan diterima. Demikian pula bagi pendidikan dasar. Karena pendidikan dasar wajib, semua anak usia pendidikan dasar harus masuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, apakah sekolah itu sistem jarak jauh atau tatap muka, harus menerima siapa saja yang ingin masuk sekolahnya. Bila mutu peserta didik baik, maka hasil pendidikannya biasanya juga akan baik. Bila peserta didik tidak bermutu, maka sulit bagi lembaga pendidikan untuk membuat peserta didiknya berhasil baik. Bagi peserta didik PJJ mutu yang baik tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan otaknya, akan tetapi juga kemauannya untuk belajar mandiri. Meskipun peserta didik PJJ pandai, apabila tidak disiplin untuk belajar mandiri akan gagal. Mutu pendidikan suatu lembaga tidak bisa hanya tergantung dari mutu peserta didiknya. Bila proses pendidikannya baik, maka hasil yang dicapainya juga bisa baik, meskipun peserta didiknya mula-mula kurang bermutu. Proses pendidikan suatu lembaga PJJ dapat baik bilamana didukung oleh bahan ajar yang baik, tutorial dan bantuan belajar lainnya yang baik, ujian yang baik, dan prosedur operasional lain yang memadai. Antara masukan dan proses pendidikan saling mempengaruhi. Lembaga PJJ yang proses pendidikannya baik, menjadi terkenal dan dicari oleh calon peserta didik yang memang memerlukannya.

Sekali lagi, hanya peserta didik yang mempunyai disiplin dan ketegaran untuk belajar mandiri akan berhasil di PJJ.

3. Sarana dan Prasarana Pendidikan Jarak Jauh yang Bermutu dan dapat Menjangkau Semua Anak yang Memerlukannya

Sudah jelas bahwa sarana kampus seperti lembaga pendidikan konvensional tidak diperlukan. Meskipun demikian, perlu ada sarana yang dapat digunakan sebagai kantor pusat PJJ. Sarana tersebut meliputi perkantoran bagi staf edukatif dan administrasi untuk melaksanakan tugas mereka sehari-hari. Sarana perkantoran staf administrasi tidak ada bedanya dengan sarana staf administrasi di lembaga PJJ konvensional, akan tetapi untuk staf edukatif perlu ada sarana yang cukup berbeda dengan PJJ konvensional. Selain perpustakaan, yang perlu dimiliki oleh semua lembaga pendidikan, maka staf edukatif PJJ memerlukan sarana komputer dalam rangkaian jaringan lokal yang diperuntukkan untuk pengembangan dan pengadaan bahan ajar, studio media audio dan video, gudang penyimpanan dan distribusi bahan ajar, suatu unit pengujian yang bertugas menganalisis dan menyimpan bahan dan hasil ujian, dan bila perlu sebuah percetakan untuk mencetak bahan ajar tercetak. Tetapi kemungkinan lebih efisien kalau percetakan bahan ajar dilakukan perusahaan profesional di luar lembaga PJJ.

Bilamana PJJ ingin melaksanakan belajar-e, maka sambungan internet berpita lebar adalah kebutuhan mutlak.

4. Sumber daya manusia bagi PJJ yang bermutu

Sumber daya manusia (SDM) yang bermutu perlu dimiliki oleh setiap lembaga PJJ. Hanya saja kebutuhan SDM khusus bagi PJJ tidak sama dengan kebutuhan SDM untuk lembaga pendidikan konvensional. SDM akademik untuk lembaga pendidikan konvensional harus

menguasai mata pelajaran dan cara mengajar peserta didik yang dihadapinya. SDM lembaga PJJ tidak begitu memerlukan SDM seperti itu karena para pengajarnya tidak langsung menghadapi pelajarannya. Yang diperlukan adalah SDM yang berkeahlian dalam (1) pengembangan program dan kurikulum; (2) pengembangan bahan ajar; (3) bantuan belajar, termasuk tutorial; (4) evaluasi hasil belajar; (5) teknologi informasi dan komunikasi (termasuk yang berhubungan dengan belajar-e); ditambah dengan yang berkeahlian dalam bidang-bidang serupa yang ada pada perguruan konvensional, seperti (6) keperustakaan; (7) penelitian; (8) administrasi akademik (termasuk pengelolaan registrasi, perencanaan strategik, sampai dengan pengelolaan kelulusan); (9) logistik (distribusi bahan ajar, dan penyelenggaraan pengujian) dan (10) hubungan masyarakat.

SDM yang berhubungan dengan keahlian dalam mata pelajaran yang diajarkan dapat dipunyai sendiri oleh lembaga PJJ, akan tetapi tidak mutlak, karena ahli mata pelajaran dapat dikontrak dari luar. Meskipun demikian, banyak lembaga PJJ yang mempunyai SDM ahli mata pelajaran, meskipun tugasnya tidak hanya mengembangkan mata pelajaran tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan 9 keahlian di atas. Sebab, bila seorang ahli mata pelajaran sudah selesai mengembangkan mata pelajarannya maka ia tidak ada pekerjaan lain kecuali yang berhubungan dengan 9 keahlian di atas, sebelum waktunya untuk merevisi mata pelajaran tersebut. Lembaga PJJ yang baru berdiri memerlukan waktu yang lama untuk mendidik staf edukatifnya untuk menjadi setara kualitasnya dengan staf lembaga pendidikan konvensional yang sudah lama berdiri, kecuali kalau lembaga PJJ tersebut dapat “mencuri” staf berkualitas baik dari lembaga lain untuk menjadi staf tetapnya. Karena itu, banyak lembaga PJJ yang mengontrak ahli mata pelajaran yang terbaik hanya untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu yang ahlinya tidak dimiliki lembaga PJJ itu sendiri. Kontrak akan selesai dengan selesainya tugas tersebut.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

Pengembangan mata pelajaran yang baik tidak dilakukan oleh seorang ahli mata pelajaran sendirian, akan tetapi ia dibantu oleh sebuah tim yang berkeahlian dalam kurikulum, desain dan penyajian mata pelajaran melalui media tertentu. Hasil tim pengembang bahan ajar pada umumnya dapat diharapkan lebih sempurna daripada hasil seorang ahli secara perseorangan dalam membuat bahan ajar sebagai bahan ajar mandiri dan lengkap.

5. Masalah Biaya Pendidikan Jarak Jauh

a. *Biaya Bagi Penyelenggara*

Biaya untuk pendidikan jarak jauh biasanya lebih murah daripada biaya pendidikan konvensional karena pendidikan jarak jauh biasanya adalah pendidikan massal. Pendidikan jarak jauh bagi negara yang berpenduduk padat seperti Indonesia, Korea, Thailand, dan Inggris mempunyai pendidikan tinggi jarak jauh dalam skala besar. Dengan demikian biaya per mahasiswa menjadi jauh lebih kecil daripada biaya per mahasiswa dari pendidikan tinggi konvensional. Menurut perhitungan Daniel dan Mackintosh (2003), proporsi biaya per mahasiswa dari pendidikan tinggi jarak jauh yang besar - mega universities menurut Daniel (1996) – bila dibandingkan dengan biaya mahasiswa pendidikan tinggi konvensional adalah 5% bagi *Korea National Open University*, 15% bagi Universitas Terbuka, 30% bagi *Sukhothai Thammathirat Open University*, dan 50% bagi *United Kingdom Open University*. Perbedaan yang cukup bervariasi tersebut karena perbedaan penggunaan teknologi dalam penyelenggaraannya. Pilihan teknologi tersebut tidak hanya berpengaruh pada harga perangkat keras dan perangkat lunaknya tetapi berpengaruh pula terhadap faktor-faktor lainnya, termasuk praktek kerja institusinya (Rumble, 2003). Yang dimaksud dengan praktek kerja di sini adalah cara kerja yang dilaksanakan

berdasarkan pilihan teknologi dan bagaimana sumber daya manusia digunakan (termasuk di dalamnya penggunaan tenaga lepas dibandingkan dengan tenaga tetap). Pengaruh praktek kerja terhadap biaya penyelenggaraan pendidikan jarak jauh cukup besar.

Negara-negara yang berpenduduk jarang dan tersebar, seperti Australia dan Selandia Baru, tidak mempunyai perguruan tinggi jarak jauh yang besar. Bahkan negara-negara tersebut jarang mempunyai perguruan tinggi jarak jauh modus tunggal. Pendidikan jarak jauh kebanyakan diselenggarakan oleh perguruan tinggi konvensional (modus ganda), sehingga perhitungan biayanya juga berbeda. Dosen dalam perguruan tinggi konvensional juga disertai mengampu mata kuliah PJJ yang sama, karena jumlah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan jarak jauh juga tidak banyak. Interaksi antara mahasiswa dan dosen juga lebih mudah diselenggarakan karena kampus konvensional sudah ada, sehingga biaya infrastruktur tambahan juga dapat dikurangi banyak.

Pada saat ini sudah banyak pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan oleh gabungan berbagai perguruan tinggi (modus konsorsium). Di Australia dilakukan dengan cara menyelenggarakan program studi penuh atau mata kuliah individual yang dapat ditransfer ke perguruan tinggi yang menjadi anggota konsorsium untuk menjadi bagian dari program studi pendidikan konvensional. Cara penghitungan biaya mungkin serupa dengan penghitungan pendidikan tinggi jarak jauh modus ganda, hanya lebih rumit karena meliputi berbagai institusi, cara penghitungannya mungkin lain. Menurut penulis belum ada seorangpun yang membandingkan biaya pendidikan jarak jauh modus konsorsium maupun modus ganda dengan biaya pendidikan tinggi konvensional, meskipun dapat dikatakan bahwa biayanya lebih rendah dari biaya pendidikan mahasiswa konvensional.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

b. Biaya Bagi Peserta Didik

Biaya ini sulit dihitung karena sifatnya sangat pribadi. Akan tetapi pengeluaran biaya pondokan bagi mahasiswa konvensional yang membutuhkannya, biaya transpor ke tempat kuliah, dan biaya-biaya lain yang ada hubungannya dengan biaya kehidupan mandiri mahasiswa (lepas dari orang tuanya), sangat bervariasi akan tetapi cukup besar untuk diperhitungkan bila membandingkan biaya pendidikan konvensional dan jarak jauh. Kebanyakan mahasiswa pendidikan jarak jauh tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya tersebut karena mereka dapat tetap tinggal bersama keluarga mereka. Hal ini membuka akses yang lebih besar pada pendidikan jarak jauh bagi calon peserta didik karena tidak mempunyai cukup sumber biaya untuk bertempat tinggal di tempat lain untuk mengikuti pendidikan konvensional.

D. Peningkatan Relevansi Pendidikan melalui Pendidikan Jarak Jauh

1. Pendidikan dan Pengajaran

Pada tahun 50-an Departemen Pendidikan Nasional bernama Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Pemisahan pengertian pendidikan dan pengajaran ada gunanya karena beberapa hal. Pendidikan adalah kata generik yang meliputi pula pengajaran, tetapi pendidikan juga meliputi hal-hal yang tidak termasuk pengajaran, seperti pendidikan moral dan pendidikan agama. Pengajaran meliputi hal-hal yang erat hubungannya dengan pengetahuan dan ilmu. Pengajaran mempunyai metodik sendiri yang tidak dapat begitu saja diterapkan bagi pendidikan moral dan agama. Dengan menyatukan pengertian pendidikan dan pengajaran, maka sesuatu menjadi hilang. Metodologi pendidikan moral dan agama menjadi sama dengan pengajaran. Pendidikan agama

menjadi pengajaran agama, atau pendidikan *tentang* agama. Begitu pula pendidikan moral atau budi pekerti menjadi pengajaran moral dan budi pekerti. Dengan demikian, pendidikan agama dan pendidikan moral dapat diberi nilai, dan bukankah nilai itu diperlukan untuk mengukur kemajuan peserta didik? Apakah dengan mendapatkan nilai 10 atau A untuk pelajaran agama seseorang menjadi lebih beragama daripada seorang yang mendapatkan nilai kurang dari itu? Apakah dengan mengikuti pelajaran budi pekerti anak dapat menjadi lebih bermoral? Dilema iri yang sampai sekarang belum terpecahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, sehingga perkelahian antarsekolah dan kriminalitas oleh anak sekolah bukan lagi hal yang luar biasa. Dengan menyatukan dua pengertian itu, apa yang terjadi adalah: kita menghilangkan tanggung jawab sekolah pada pendidikan. Sekolah sudah merasa cukup bila sudah memenuhi kurikulum tentang *pengajaran* agama, budi pekerti, moral, Pancasila atau apapun namanya. *Pendidikannya* sendiri menjadi tersisihkan.

2. Pendidikan untuk Apa?

Jawaban atas pertanyaan itu bermacam-macam, tergantung dari apa yang dianggap penting dalam kehidupan seseorang. Kalau kita berambisi besar, maka pendidikan ditujukan pada kesuksesan dalam membina karier kita sesudah lulus. Bila kemajuan dalam dunia modern bagi bangsanya menjadi yang utama, maka pendidikan harus ditujukan untuk membuat bangsa Indonesia ini pandai dalam ilmu dan teknologi. Bilamana fokus kita dalam pendidikan pada hal-hal seperti itu, maka pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti menjadi kurang penting. Jauh lebih mudah untuk memberikan *pelajaran* agama dan *pelajaran* budi pekerti dan moral Pancasila, dengan harapan bahwa pengetahuan tentang agama dan moral Pancasila akan membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Hal

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

itu tidak mungkin terjadi, banyak di antara kita yang memakluminya, akan tetapi apa yang harus dilakukan? Tidak banyak ahli yang peduli untuk menjawabnya, karena waktunya habis untuk memikirkan karier dan kekayaan, pembangunan fisik, ilmu dan teknologi, yang juga penting untuk dipikirkan dan dilaksanakan, tetapi bila sampai melupakan aspek kehidupan yang lebih penting, seperti agama dan budi pekerti, maka seluruh kehidupan manusia akan rusak, seperti yang sekarang sudah terjadi di mana-mana. Masalah ini harus ditangani, baik oleh pendidikan konvensional, pendidikan jarak jauh, pendidikan masyarakat maupun pendidikan dalam keluarga.

3. Pengajaran yang Relevan

Untuk menyesuaikan pelajaran dengan ilmu pengetahuan yang berubah dengan cepat PJJ lebih sulit daripada pendidikan konvensional karena pendidikan jarak jauh banyak menggunakan media yang sulit diubah setiap tahun, sedangkan pada pendidikan konvensional, karena media utamanya adalah orang (guru), maka perubahan pelajaran dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Untunglah bahwa keharusan untuk mengubah pelajaran supaya relevan dengan kehidupan peserta didik biasanya tidak banyak dari tahun ke tahun. Namun demikian, supaya pendidikan jarak jauh tidak terjebak pada materi pelajaran yang sebetulnya sudah usang, maka pengembang pelajaran harus mengadakan survei terlebih dahulu sebelum menetapkan materi pelajaran secara detail. Sekali materi ditetapkan dan dibuat, maka biasanya materi tersebut dipertahankan selama lima tahun, sebelum materi tersebut direvisi dan dibuat kembali. Hal ini terutama berlaku bagi materi pelajaran yang jumlahnya dibuat banyak, karena diminati oleh banyak peserta didik. Bagi materi yang dibuat sedikit jumlahnya, karena tidak begitu diminati oleh peserta didik, revisi materi juga masih sulit dilakukan, karena usaha pembuatan materi biasanya meliputi banyak orang

(satu tim pengembang mata pelajaran), yang sulit untuk ditugasi merevisi setiap tahun, apalagi kalau tim pengembang terdiri dari orang-orang di luar lembaga pendidikan jarak jauh itu sendiri.

4. Peningkatan Relevansi Pengajaran

Sebelum berumur lima tahun, bila sangat diperlukan, materi bahan ajar dapat pula ditambah suplemen singkat tentang perubahan-perubahan yang diperlukan. Bagi materi yang sudah berumur lima tahun, survei materi harus diulang bila terlihat bahwa materi itu sudah usang. Hal ini tidak dapat ditawar bilamana pendidikan jarak jauh ingin meningkatkan relevansi dan sekaligus kualitas materi pelajarannya.

Materi pelajaran pendidikan jarak jauh sangat transparan karena setiap orang yang mau dapat mempelajarinya. Dengan demikian, materi yang sudah tidak relevan lagi dan sudah ketinggalan zaman, akan berdampak negatif pada reputasi lembaga pendidikan jarak jauh yang bersangkutan.

E. Peningkatan Efisiensi Pendidikan melalui Pendidikan Jarak Jauh

1. Pendidikan yang Efisien

Pendidikan (atau pengajaran) yang lebih efisien adalah pendidikan yang dapat mencapai sarannya dengan sumberdaya yang lebih kecil. Efisiensi adalah perbandingan cara sekarang dengan cara lama atau cara lain, artinya bilamana cara sekarang menggunakan sumberdaya yang lebih kecil daripada cara lama atau cara lain maka cara sekarang lebih efisien dibandingkan dengan cara lama atau cara lain itu untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam hal ini efisiensi PJJ dibandingkan dengan efisiensi pendidikan

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

konvensional dalam menggunakan sumberdaya untuk mencapai tujuan yang sama. Biasanya sumberdaya diukur dengan uang. Bilamana uang yang digunakan lebih kecil untuk mencetak lulusannya, maka lembaga itu lebih efisien. Pada pasal 5a di atas tentang pembiayaan pendidikan sudah disebutkan bahwa semua PTJJ (mega universities) yang diteliti lebih efisien dari PT konvensional. Tentunya masih dapat dipertanyakan, apakah hasil dari PTJJ dan PT konvensional itu setingkat. Ada yang mengatakan bahwa PTJJ menghasilkan lulusan yang lebih mandiri, maka dari itu lulusannya lebih dicari oleh perusahaan yang ingin mencari staf baru; tetapi ada pula yang mengatakan bahwa PT konvensional menghasilkan lulusan yang lebih bermutu. Belum ada penelitian (setidaknya di Indonesia) yang berusaha menjawab mana pendapat yang benar, atau seberapa jauh kebenaran masing-masing pendapat tersebut. Yang sudah jelas adalah PJJ sebagai lembaga pendidikan massal mempunyai keuntungan skala ekonomis, sehingga biaya unitnya menjadi jauh lebih kecil.

2. Pengelolaan Pendidikan

Dari segi pengelolaan pendidikan PJJ mempunyai sifat seperti industri. Bahan ajar diperbanyak dalam skala besar dan proses pembuatannya dikontrol kualitasnya layaknya sebuah pabrik yang membuat barang. Distribusi bahan ajarnya juga dilakukan seperti distribusi barang pabrik ke distributornya untuk sampai ke penggunaannya. Registrasi mahasiswa juga dilakukan seperti pada industri yang pesannya datang dari mana-mana. Sebagian pengelolaan PJJ dilaksanakan seperti pada industri perangkat lunak. Peningkatan efisiensi di sini dapat mengikuti cara-cara industri yang efisien, meskipun sebagian masih pula mengikuti efisiensi PT konvensional, seperti efisiensi yang diukur dengan produktivitas lulusan. Ditinjau dari segi produktivitas dengan memakai ukuran

jumlah lulusan dibagi jumlah mahasiswa, maka produktivitas lembaga PJJ jauh lebih kecil daripada produktivitas lembaga pendidikan konvensional. Tetapi harus diingat, bahwa peserta didiknya kebanyakan adalah mereka yang belajar sambil bekerja, sehingga tidak bisa mereka belajar penuh waktu. Karena itu, mereka harus diberi waktu lebih untuk menyelesaikan pendidikannya. Waktu lebihnya juga tidak dapat ditentukan oleh lembaganya karena waktu lebih yang diperlukan peserta didik PJJ sangat ditentukan oleh masing-masing individu. Apabila pekerjaannya ringan dan ia tidak banyak bepergian, dan bilamana ia dapat menyisihkan 50% dari waktu yang dipakai oleh peserta didik lembaga pendidikan konvensional untuk belajar, peserta didik PJJ bisa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu dua kali lipat peserta didik pendidikan konvensional. Bila lembaga PJJ menghasilkan lulusan rata-rata dalam jangka waktu dua kali dari lembaga pendidikan konvensional maka produktivitas lembaga PJJ dan lembaga pendidikan konvensional tersebut bisa disamakan.

3. Peran Guru dan Kepala Sekolah

Peran guru dan kepala sekolah pendidikan konvensional biasanya sangat penting bagi PJJ, terutama PJJ yang melaksanakan pendidikan guru. SMP terbuka dan SMA terbuka masih memerlukan guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tutorial yang dilaksanakan secara periodik di sekolah yang berdekatan dengan kelompok belajar SMP dan SMA terbuka. Fasilitas belajar pada sekolah itu juga digunakan untuk belajar peserta didik PJJ. Dengan pengaturan seperti itu sudah jelas bahwa peran guru dan kepala sekolah konvensional tersebut sangat besar dalam PJJ. Dengan menggunakan SDM yang sama maka PJJ tersebut sudah jelas dapat menghemat dalam penggunaan SDM.

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

Begitu pula halnya bagi pendidikan guru SD setara DII. Guru SD yang dididik berperan sebagai peserta didik. Tutor diambil dari masyarakat, kepala sekolah, atau guru SMP yang sudah berpendidikan S1. Sekolah digunakan sebagai sekolah latihan bagi guru-guru peserta didik, yang disupervisi oleh guru-guru yang sudah mempunyai kualifikasi sebagai supervisor dari Pemantapan Pengalaman Lapangan (PPL). Dengan menggunakan tenaga pendidik yang sudah ada maka penggunaan tenaga supervisor bagi PPL dapat pula dihemat. Dengan demikian, penyelenggaraan PJJ menjadi lebih efisien.

4. Peran Orang Tua

Pendidikan jarak jauh bagi anak kecil memerlukan bantuan orang tua, terutama ibu. Di Australia orang tua ikut serta untuk mengajar anaknya yang belum dapat membaca dan menulis, atas dasar petunjuk dan bahan ajar yang diberikan oleh kantor pusat PJJ. Di Indonesia, banyak ibu yang dilatih untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui PJJ. Dengan demikian, orang tua-lah yang mengikuti PJJ untuk dapat mengasuh anaknya yang masih berumur di bawah enam tahun. Orang tua yang berpendidikan juga dapat menjadi sumber pengetahuan bagi anaknya yang berkesulitan menghadapi tugas dari PJJ yang diikutinya. Bantuan yang diberikan orang tua ini ikut membuat PJJ menjadi lebih efisien.

5. Peran Masyarakat Sekitar Kelompok Belajar

Untuk pelaksanaan Paket A setara SD, Paket B dan Paket C, peran masyarakat sangat penting. Mereka berfungsi sebagai motivator, tutor dan pengelola lembaga PJJ nonformal tersebut. Bagi jenis PJJ lain peran mereka terbatas pada penyelenggara (PAUD) dan mereka yang memenuhi kualifikasi, dapat diangkat menjadi tutor.

Pada SD Pamong, yang sudah tidak dilaksanakan lagi, peran masyarakat sebetulnya cukup besar, sama dengan peran mereka dalam Paket A, B dan C, dan sebagai pendukung dilaksanakannya SD Pamong. Anggota masyarakat ini banyak menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan peserta didik PJJ dalam masyarakat lingkungannya dengan sukarela atau dengan biaya yang minimal sehingga kontribusi mereka dapat membuat PJJ lebih efisien.

F. Reformasi Pendidikan melalui Pendidikan Jarak Jauh

1. Reformasi Pendidikan

Reformasi pendidikan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Bagi lembaga pendidikan hal itu berarti bahwa lembaga pendidikan diberdayakan secara lebih luas lagi. Memberdayakan lembaga pendidikan bukannya berarti otonomi penuh dalam mengelola dan menentukan kurikulumnya, akan tetapi ada batasan-batasan yang lebih jelas dan longgar tentang apa yang dapat dilakukan oleh sekolah. Sudah jelas kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh undang-undang itu memerlukan sumberdaya manusia yang lebih canggih, baik pengajarnya maupun orang tua peserta didiknya, yang berperan sangat penting sebagai wali amanat. PJJ dapat mengatasi ini dengan relatif cepat karena sumberdaya manusianya dapat ditingkatkan secara relatif serentak, tanpa harus meninggalkan tugas masing-masing. Pengajar tidak perlu meninggalkan tugas mengajarnya dan para orang tua atau anggota masyarakat lain yang berkecimpung dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak perlu meninggalkan tugas masing-masing. Mendidik Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan adalah salah satu tugas yang dapat dilaksanakan

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

PJJ, supaya kedua lembaga tersebut dapat segera berfungsi dengan baik. Yang terjadi pada saat ini adalah bahwa kedua lembaga tersebut masih banyak dipengaruhi oleh lembaga atau instansi pendidikan yang harus dibinanya, sehingga fungsi mengarahkan dan supervisi tidak dapat secara efektif dilaksanakan.

Yang terkandung dalam reformasi yang diamanatkan undang-undang tersebut *pertama-tama* adalah adanya lembaga pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya dilakukan melalui kurikulum yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi juga dengan memberdayakan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Yang *kedua* adalah membudayakan dan memberdayakan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Reformasi dalam memberdayakan peserta didik ini yang masih harus diusahakan, karena kebanyakan pendidik masih menganggap bahwa peserta didik harus dibentuk sesuai tujuan pendidikan, dan bukan diberi kesempatan untuk berkembang sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Pendidik tidak perlu menganggap dirinya selalu lebih pandai dari peserta didik, dan menganggap peserta didik harus diberitahu mana yang benar dan mana yang tidak. Jarang sekali ada pendidik yang merasa sudah cukup untuk menjadi fasilitator dan menyilahkan peserta didik mencari sendiri pengetahuan dan keterampilan yang diperlukannya, sehingga kreativitas peserta didik dapat berkembang. Pendidik kebanyakan terlalu mementingkan memberikan pengetahuan, nasihat dan pengarahan kepada peserta didik, seakan-akan itulah satu-satunya tugasnya. Mengubah sikap pendidik menjadi pendidik yang dapat memberdayakan peserta didik adalah sesuatu yang sulit dan memakan banyak waktu.

Yang *ketiga* adalah meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan berdasarkan standar nasional dan global.

Reformasi ini sekarang menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Ujian akhir berdasarkan standar nasional adalah salah satu dari usaha reformasi yang ditentang oleh sebagian masyarakat, terutama oleh peserta didik yang tidak lulus dan orang tuanya. Menerapkan standar nasional seleksi untuk semua peserta didik adalah salah satu cara menggunakan standar nasional. Cara lain adalah menguji siswa sekolah secara random untuk mengetahui prestasi sekolah, tetapi hasilnya tidak digunakan untuk seleksi kelulusan siswa atau membentuk dewan penguji nasional yang dapat memberikan sertifikasi keunggulan kelulusan bagi siswa yang menghendaknya. Sertifikat ini dapat digunakan untuk meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, sekaligus untuk menilai prestasi sekolah yang siswanya ikut serta dalam ujian sertifikasi nasional ini. Hal ini bukan diskriminasi karena ujian dilakukan secara sukarela dan tidak menentukan kelulusan siswa.

Yang keempat adalah penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola oleh pemerintah dan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat. Meskipun tujuannya mulia, tetapi implementasinya perlu mendapatkan pemikiran yang cermat karena bisa terjadi pengelolaan lembaga pendidikan pemerintah sedikit lebih longgar sedangkan lembaga pendidikan swasta malah menjadi sangat terbatas gerakannya karena disamakan dengan lembaga pendidikan pemerintah.

2. Mengapa Perlu Reformasi?

Reformasi diperlukan bilamana tatanan yang ada sudah dirasa usang. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 sudah berusia empat belas tahun pada waktu Undang-Undang yang sekarang ini diterbitkan. Jadi, memang sudah perlu ada pembaharuan. Akan tetapi yang memicu reformasi adalah pergantian pemerintah yang dianggap

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

otoriter menjadi pemerintah yang lebih demokratis. Jadi gerakan reformasi dalam bidang politik yang menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan bangsa dan negara berdampak besar dalam pendidikan. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, maka dasar hukum reformasi menjadi lebih jelas.

3. Langkah-langkah Reformasi

Apabila reformasi dalam bidang pendidikan mengandung empat unsur maka tugas reformasi sangat besar. Pertama perlu diperhatikan komitmen pemerintah untuk menyediakan 20% anggarannya bagi pendidikan. Kelihatannya hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam waktu beberapa tahun saja. Kalau sudah dilaksanakan mendekati 20%, sudah cukup banyak yang dapat dilakukan.

Selain penyediaan sarana dan prasarana, gaji guru yang layak, pendidikan dan latihan guru dan tenaga kependidikan lainnya perlu ditingkatkan. Prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sebagian di desentralisasi perlu mendapatkan perhatian utama untuk mencegah korupsi yang sudah lama masuk ke bidang pendidikan. Suasana yang sudah relatif bersih dari korupsi akan memudahkan reformasi pendidikan dilakukan. Pendidikan masyarakat sekitar sekolah untuk berani bertanggung jawab atas pelaksanaan sekolah adalah salah satu unsur reformasi yang diperlukan. Kalau masyarakat masih takut kepada kepala sekolah dan guru karena takut anaknya tidak diterima, maka sekolah yang profesional dan akuntabel akan sulit dikembangkan. Pengawasan dari orang tua dan masyarakat lingkungan sekolah adalah paling efektif untuk mencegah segala jenis malpraktek yang terjadi di sekolah. Undang-undang sudah membuka jalan untuk itu, tinggal orang tua dan masyarakat berani melaksanakannya dengan baik. Kritik terhadap pemerintah dan DPR sekarang sudah semakin berani. Jadi, semesti-

nya kritik terhadap sekolah, yang dibarengi dengan tindakan nyata untuk meluruskan semua yang menyeleweng dari jalan yang semestinya dapat dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

Reformasi internal lembaga pendidikan dapat segera dilakukan tanpa menunggu diterimanya anggaran 20%. Banyak yang dapat dilakukan untuk membudayakan dan memberdayakan peserta didik sehingga mereka dapat lebih kreatif bertindak dan tidak hanya menunggu perintah pendidik. Perubahan kurikulum berdasarkan kompetensi tidak akan berhasil bilamana pendidik masih mengira bahwa pendidik harus lebih pandai dalam segalanya daripada peserta didik. Karena itu, tugasnya adalah mengarahkan peserta didik supaya mereka menjadi *orang*. Sikap otoriter semacam ini masih banyak terdapat di kalangan para pendidik. Tanpa perubahan sikap pendidik menjadi fasilitator pendidikan para peserta didik tidak akan berkembang menjadi manusia yang kreatif.

4. Peran Pendidikan Jarak Jauh dalam Reformasi Pendidikan

Apa peran yang dapat dimainkan oleh PJJ dalam reformasi pendidikan? Kekuatan PJJ antara lain adalah distribusi informasi dan pelatihan. Dalam hal reformasi, kedua kekuatan itu dapat digunakan. Sosialisasi reformasi dapat dilaksanakan dengan cepat bila lembaga PJJ dapat dilibatkan dalam pengembangan dan pendistribusian informasi tentang reformasi pendidikan yang ingin dilaksanakan. Sosialisasi tidak cukup untuk menggerakkan reformasi itu sendiri. Personil kunci dalam birokrasi pendidikan perlu mendapatkan latihan-latihan khusus bagaimana menggerakkan reformasi itu ke lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah tanggung jawabnya. Guru dan kepala sekolah perlu pula mendapatkan informasi lengkap tentang reformasi pendidikan yang dapat diterapkan di sekolahnya, dilanjutkan dengan latihan-latihan

- Pendidikan Jarak Jauh dalam Konteks Pendidikan Nasional

yang diperlukan. PJJ bersama lembaga lain dapat membantu dalam menyediakan tutor dan pengawasnya.

Peran lain dari PJJ dalam reformasi adalah pemerataan pendidikan: pemberian kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan, dan adanya materi pembelajaran yang dapat dikontrol oleh masyarakat, serta sifat pendidikannya yang egaliter. Karena peran-peran tadi maka PJJ juga dapat membantu dalam mengembangkan standardisasi pendidikan. □

Daftar Pustaka

Daniel, John dan Wayne Mackintosh. 2003. Leading ODL Futures in the Eternal Triangle: The Mega-University Response to the Greatest Moral Challenge of Our Age; dalam Michael Graham Moore dan William G. Anderson (Ed). *Handbook of Distance Education*.

Moore, Michael G. dan Greg Kearsley. 1996. *Distance Education. A Systems View*. London: Wadsworth Publishing Company.

Rumble, Greville. 2003. Modelling the Costs and Economics of Distance Education; dalam Michael Graham Moore dan William G. Anderson (Ed). *Handbook of Distance Education*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.